

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018-2023

Kurnius Sale Reza Jhonatan & Astuti Yuli Setyani

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

Email: 12170219@students.ukdw.ac.id, astutys@staff.ukdw.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the Financial Performance of Sanggau Regency in 2018-2023 seen from (1) Decentralization Ratio, (2) Effectiveness Ratio, (3) Expenditure Efficiency Ratio, (4) Growth Ratio, (5) Independence Ratio, (6) Harmony Ratio (Operating Expenditure and Capital Expenditure), (7) Dependency Ratio. This study used a quantitative descriptive analysis technique method using secondary data. The data used is sourced from the financial statements of the Sanggau Regency Government for the 2018-2023. Based on the results of the study, the Regional Government of Sanggau Regency has not been able to increase its PAD revenue. Judging from the average ratio of the degree of decentralization of 7,88%, it is considered insufficient in increasing PAD. The average effectiveness ratio is 111,29% with very effective criteria. The average efficiency ratio of 93,04% is still less efficient. The average growth ratio of -2,78% has not been able to increase PAD growth. For the independence ratio, it is still not independent seen from the average of 9,63%. The regency regional Government agrees that the allocation of funds for operating expenditure is greater than capital expenditure. The average dependency ratio is 81,69% in the high criteria, the role of the central government in providing transfer assistance still dominates. It is expected that the local Government of Sanggau can increase PAD more, and make priority scale of allocation of regional expenditure.

Keywords decentralization ratio, effectiveness ratio, expenditure efficiency ratio, growth ratio, independence ratio, harmony ratio (operating expenditure and capital expenditure).

1. Pendahuluan

Indonesia negara kepulauan yang beragam adat istiadat setiap daerahnya, memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, hal itu menjadi landasan pemerintah pusat menyepakati bahwa setiap daerah memiliki otonomi daerahnya masing-masing di setiap Provinsi/Kota Kabupaten.

Otonomi daerah adalah bentuk dari sistem desentralisasi yaitu pemberian hak dan tanggungjawab kepada daerah untuk mengelola secara mandiri daerahnya masing-masing. Kebijakan yang telah diberikan kepada daerah dengan tujuan melihat kemampuan daerah dalam memanajemen sumber penerimaan, serta potensi yang dimiliki daerah untuk membiayai segala aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, tanpa harus melibatkan pemerintah pusat ikut dalam ambil keputusan.

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus selaras dengan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya seperti sumber penerimaan PAD, dana untuk pembangunan dan biaya operasional. Kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah diharapkan dijalankan sesuai kebutuhan daerah dan dikelola

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

dengan adil.

Pembangunan daerah akan berjalan lancar, jika dana daerah banyak, oleh sebab itu pemerintah daerah harus pandai dan kreatif dalam mengelola PAD untuk mengoptimal pemajuan daerah. Untuk mempertahankan pendanaan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, maka BPKAD harus mampu memaksimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan PAD dan keuangan lainnya (Rahmayati, 2016).

Daerah Kabupaten Sanggau, yang merupakan daerah otonom mempunyai tanggungjawab terhadap pendapatan atau penerimaan asli daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah. Suatu daerah dapat dinilai mandiri apabila dana PAD-nya terus meningkat dan dalam penyelenggaraan aktivitas pembangunan daerah tidak lagi bergantung dari pembiayaan pemerintah pusat. Adapun permasalahan yang muncul dapat menjadi penghambat tercapainya target penerimaan daerah yang optimal di Kabupaten Sanggau, mengacu pada rendahnya kualitas SDM.

Penilaian terhadap pemerintah daerah dilihat dari manajemen kinerja keuangannya. Daerah yang efektif dalam pengelolaan anggarannya menunjukkan bahwa kinerja keuangannya daerah tersebut baik. Penganggaran keuangan yang efektif dan efisien menunjukkan pada penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama, serta penggunaan dana publik untuk memaksimalkan hasil *output*, sedangkan penganggaran keuangan yang ekonomis mengacu pada penggunaan sumber daya yang berkualitas tinggi tetapi dengan biaya bisa diterima (Mardiasmo, 2004). Kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah tentang bagaimana penggunaan APBD sudah sesuai atau belum dengan yang diharapkan.

2. Tinjauan Literatur

Teori Keagenan (Agency Theory). Jensen & Meckling (1976) teori agensi yaitu hubungan keagenan antara principal dengan agent. Keagenan disini yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, atau kaitan pusat dengan daerah. Dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintahan daerah dimintai pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dipercayakan. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa berupa hasil laporan keuangan, hasil pembangunan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi Daerah. Daerah diberikan kepercayaan dalam membuat, mengelola, serta mengambil keputusan tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah. Bentuk cara pengurusan kegiatan pemerintahan dengan memanfaatkan potensi daerah seperti pengelolaan sektor pajak, retribusi daerah, serta sektor wisata demi peningkatan ekonomi. Otonomi daerah dipercayakan untuk tujuan pembangunan daerah yang lebih maju, dalam pelaksanaannya otonomi agar daerah lebih baik, akan sangat penting bagaimana peranan kualitas sumberdaya manusianya, jika sumberdaya manusia sudah baik maka pembangunan suatu daerah tersebut akan lebih mudah.

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

APBD. UU No.33 Tahun 2004, APBD sebuah sistem penyaluran dana untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. APBD bertujuan untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang mencakup seluruh pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun, yang disetujui oleh DPRD (Mardiasmo, 2012). APBD terdiri atas pendapatan dan belanja, dapat dijelaskan pada poin dibawah: (1) Pendapatan Daerah: Pendapatan daerah terdiri dari PAD dan transfer. PP No. 12 tahun 2019, yang menyatakan keuangan daerah adalah segala hak dan tanggung jawab daerah untuk memperoleh dan menambah penerimaan yang menjadi milik daerah dalam waktu tertentu. (2) Belanja Daerah: Belanja daerah adalah kebalikan dari pendapatan daerah. Menurut Kementerian Keuangan (UU No. 33 Tahun 2004), yaitu semua kewajiban daerah yang disetujui sebagai pengurangan nilai kekayaan.

Kinerja Keuangan Daerah. Kemampuan daerah mengelola sumber pendapatan serta mengontrol pengeluaran. Kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai penyelenggaraan otonomi daerah, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan untuk penilaian bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus menyampaikan gambaran tentang hasil kinerjanya berupa informasi yang mudah dipahami publik dan transparan.

Analisis Rasio. Membandingkan angka-angka di laporan keuangan untuk menggambarkan keadaan keuangan suatu instansi dalam menilai kinerja manajemen atau pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam suatu periode tertentu (Mailangkay, murni dan Rate, 2020). Rasio keuangan pemerintah daerah memberikan informasi yang penting mengenai aspek-aspek keuangan pemerintah daerah, seperti efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, kemandirian, ketergantungan dan lainnya yang berkaitan. Dibawah merupakan beberapa rasio yang digunakan:

Rasio Derajat Desentralisasi. Memberikan gambaran mengenai besarnya jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin baik pula kinerja pemda dalam pengadaan desentralisasikan serta kapasitas kontribusinya terhadap daerah tersebut. PAD yang besar menentukan kemampuan suatu daerah tersebut dalam mengelola, mengatur dan mengendalikan keuangan daerahnya dengan baik.

Rasio Efektivitas PAD. Perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil program dengan target yang sudah ditetapkan (Halim, 2012 Dalam Chasanah dan Panjawa, 2020). Pemerintah daerah dikatakan efektif dalam mengelola daerahnya apabila kemampuan rasio efektivitas mencapai minimal sebesar 100% (Susanto, 2018). Pengukuran rasio efektivitas dirumuskan dengan membandingkan antara PAD realisasi dengan target yang dianggarkan sebelumnya (Fathah, 2017).

Rasio Efisiensi. Yaitu perbandingan antara besarnya biaya belanja dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Pemda disediakan dana untuk dibelanjakan dalam membangun daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin kecil nilai rasio efisiensi yang diperoleh, menunjukan tingkat penggunaan belanja daerah. semakin efisien, yang artinya pengeluaran biaya berhasil untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Rasio Pertumbuhan. Rasio pertumbuhan berguna untuk mengevaluasi tingkat kenaikan

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

keuangan daerah setiap tahunnya. Daerah yang memiliki pertumbuhan keuangan yang baik menandakan kemampuan kepala daerah dalam manajemen penerimaan PAD-nya berhasil.

Rasio Kemandirian. Rasio kemandirian adalah untuk mengukur penerimaan PAD dibagi transfer dari pemerintah pusat. Jika nilai rasio mencapai tingkat 75% keatas, maka daerah dapat dikatakan berhasil menjalankan kewajibanya dalam penagihan pajak serta retribusi untuk pembiayaan aktivitas pemerintahan secara mandiri.

Rasio Keserasian. Bertujuan untuk menggambarkan apakah penggunaan anggaran daerah diprioritaskan untuk hal yang produktif atau konsumtif. Daerah yang pengalokasian dana lebih besar untuk biaya operasional maka biaya modal akan cenderung lebih kecil.

Rasio Ketergantungan. Rasio Ketergantungan kurang lebih sama seperti rasio kemandirian, yaitu menggambarkan independent financial daerah dengan cara perhitungan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah. Nilai rasio yang signifikan mepresentasikan tingkat kebergantungan daerah tinggi.

3. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website kemenkeu berupa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau tahun 2018-2023. Penelitian ini menggunakan prosedur dokumentasi dengan membaca informasi dari jurnal, artikel pendukung dan karya ilmiah lainnya. Situs web juga digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini <https://sanggaukab.bps.go.id/> <https://sanggau.go.id/transparansi-anggaran> dan <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>.

Pengolahan data menggunakan rasio:

Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{PAD \text{ Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

$$PAD = \frac{(PAD \text{ tahun } x) - (PAD \text{ tahun } x - 1)}{PAD \text{ tahun } x - 1} \times 100\%$$

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Rasio Kemandirian

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio Keserasian

$$Rasio Belanja Operasi = \frac{total Belanja Operasi}{Belanja Daerah} \times 100\%$$

$$Rasio Belanja Modal = \frac{Belanja Modal}{Belanja Daerah} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan

$$RKKD = \frac{Pendapatan Transfer}{Total Penerimaan Daerah} \times 100\%$$

4. Hasil dan Pembahasan

Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah, peneliti menggunakan data laporan realisasi anggaran dan belanja daerah Kabupaten Sanggau periode 2018-2023. Kinerja Keuangan Kabupaten Sanggau akan diketahui melalui perhitungan rasio sebagai berikut:

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 1. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023

Tahun	PAD (Miliar Rp)	Total Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2018	117,50	1.570,85	7,48	Sangat Rendah
2019	117,49	1.652,66	7,11	Sangat Rendah
2020	117,92	1.521,39	7,75	Sangat Rendah
2021	129,73	1.660,75	7,81	Sangat Rendah
2022	161,38	1.594,43	10,04	Rendah
2023	114,89	1.643,70	6,99	Sangat Rendah
Rata-rata	126,49	1.607,30	7,88	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 1 menunjukkan bahwa, di tahun 2018 memiliki rasio sebesar 7,48% yang artinya PAD-nya masih sangat rendah, karena masih dalam interval 0%-10% yang dalam kriteria sangat rendah. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7,11%, yang artinya juga PAD-nya masih sangat rendah. Kemudian pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 7,75%, dilanjutkan pada tahun 2021 dengan nilai persentase 7,81%, masih dalam kriteria sangat minim, karena masih dalam perolehan interval di 0%-10%. Tahun 2022 sebesar 10,04% namun masih tergolong rendah, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan tingkat desentralisasi sebesar 6,99%, yang artinya penerimaan PAD pada tahun tersebut menjadi yang paling rendah. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Sanggau

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

mulai menunjukkan kenaikan yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2022 walaupun tidak terlalu signifikan. Rata-rata rasio dalam kurun waktu 6 tahun sebesar 7,88% yang dikategorikan dalam kriteria sangat rendah.

Analisis Rasio Efektivitas PAD

Tabel 2 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi PAD (Miliar Rp)	Anggaran PAD (Miliar Rp)	REPAD (%)	Keterangan
2018	117,50	92,94	126,43	Sangat Efektif
2019	117,49	102,04	115,14	Sangat Efektif
2020	117,92	104,27	113,09	Sangat Efektif
2021	129,73	110,90	116,98	Sangat Efektif
2022	161,38	141,00	114,45	Sangat Efektif
2023	114,89	140,73	81,64	Kurang Efektif
Rata-rata	126,49	115,31	111,29	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 2 rasio efektivitas PAD tahun 2018 menunjukkan nilai rasio sebesar 126,43% yang tergolong sangat efektif, karena berada di batas atas interval 100%. Tetapi pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan, terlihat pada tahun 2019 dengan nilai 115,14%, tahun 2020 sebesar 113,09%, di tahun 2021 dengan angka 116,98%. Pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 114,45%, tetapi masih tergolong dalam kriteria sangat efektif. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dengan nilai persentase rasio sebesar 81,64% yang tergolong kedalam kriteria kurang efektif, karena berada di interval 75%-89%. Jika dilihat secara keseluruhan nilai rata-rata perolehan rasio efektivitas PAD pemerintah daerah Kabupaten Sanggau mencapai angka sebesar 111,29% yang tergolong sangat efektif, karena hasil yang diperoleh melampaui batas atas nilai interval 100%.

Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Keuangan Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Daerah (Miliar Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	REKD (%)	Kriteria
2018	1.500,87	1.570,85	95,55	Kurang Efisien
2019	1.590,58	1.652,66	96,24	Kurang Efisien
2020	1.501,98	1.521,39	98,72	Kurang Efisien
2021	1.543,69	1.660,75	92,95	Kurang Efisien
2022	1.646,06	1.594,43	103,24	Tidak Efisien
2023	1.188,95	1.643,70	72,33	Efisien
Rata-rata	1.495,36	1.607,30	93,04	Kurang Efisien

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Hasil rata-rata rasio efisiensi belanja keuangan daerah Kabupaten Sanggau dilihat dari tabel 3 dengan angka sebesar 93,04% masih kurang efisien, karena di interval 90%-100% yang tergolong dalam kriteria kurang efisien. Dimulai dari tahun 2018 dengan nilai rasio efisiensi sebesar 95,55% masih tergolong kurang efisien. Pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 96,24% juga masih dalam kriteria kurang efisien, karena masih dalam nilai interval 90%-100%. Pada tahun 2020 angka rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 98,72% kurang efisien, dilanjut pada tahun 2021 sebesar 92,95% masih dalam kriteria kurang efisien. Pada tahun 2022 rasio efisien belanja keuangan pemerintah Kabupaten Sanggau sangat menurun yaitu dengan rasio mencapai angka 103,24% tidak efisien, karena berada di batas atas nilai interval 100% yang tergolong kedalam kriteria tidak efisien. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan rasio efisiensi dengan nilai sebesar 72,33% yang tergolong dalam nilai interval 60%-80% dengan kriteria efisien.

Analisis Rasio Pertumbuhan

Tabel 4. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023

Tahun	PAD (Miliar Rp)	RPKD (%)	Pertumbuhan
2017	151,92	-	-
2018	117,50	-22,66	Rendah Sekali
2019	117,49	-0,01	Rendah Sekali
2020	117,92	0,37	Rendah Sekali
2021	129,73	10,02	Rendah Sekali
2022	161,38	24,40	Sedang
2023	114,89	-28,81	Rendah Sekali
Rata-rata		-2,78	Rendah Sekali

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4 dapat menunjukkan bahwa, rata-rata pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Sanggau selama tahun 2018-2023 masih sangat rendah atau bisa dikatakan bahkan sangat buruk, dengan pertumbuhannya masih minus dibawah 0% yaitu batas bawah nilai interval. Rasio pertumbuhan pada tahun 2018 diperoleh angka -22,66% yang artinya sangat rendah atau sangat buruk, nilai yang diperoleh dibawah interval 0%. Pada tahun 2019 nilai pertumbuhan sebesar -0,01% tetapi masih dalam kriteria rendah sekali masih dibawah 0%, pada tahun 2020 mulai ada peningkatan sebesar 0,37%, tetapi masih dalam kriteria rendah sekali, kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 10,02%, tetapi juga masih berada dalam interval 0%-10% yang artinya masih sangat rendah. pada tahun 2022 kenaikan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 24,40%, masuk kedalam nilai interval 20%-30% dalam kategori pertumbuhan sedang. Pertumbuhan paling buruk ditunjukkan pada tahun 2023 dengan angka perolehan rasio pertumbuhan sebesar -28,81 yang artinya sangat-sangat buruk dari tahun-tahun sebelumnya.

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Analisis Rasio Kemandirian

Tabel 5. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023

Periode	PAD (Miliar Rupiah)	Pendapatan Transfer (Miliar Rupiah)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2018	117,50	1.173,27	10,02	Instruktif
2019	117,49	1.393,87	8,43	Instruktif
2020	117,92	1.187,28	9,93	Instruktif
2021	129,73	1.359,79	9,54	Instruktif
2022	161,38	1.332,48	12,11	Instruktif
2023	114,89	1.431,04	8,03	Instruktif
Rata-rata	126,485	1.312,96	9,63	Instruktif

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5 pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau diatas menunjukkan bahwa, RKKD dari tahun 2018-2023 mengalami naik turun, terlihat pada tahun 2018 sebesar 10,02%, kemudian turun menjadi 8,43% di tahun 2019, yang artinya rendah sekali karena dalam interval 0%-25%. Di tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 9,93%, tetapi masih berada di interval 0%-25% kriteria instruktif. Pada tahun 2021 yaitu 9,54%% kategori instruktif. Rasio paling rendah terjadi pada tahun 2023 hanya sebesar 8,03%, dan yang paling tinggi 12,11% yaitu pada tahun 2022, tetapi masih dalam kriteria sangat rendah karena masih berada di interval 0%-25%.

Analisis Rasio Kesenjangan

Tabel 6. Perhitungan Rasio Kesenjangan (Belanja Operasi) Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Miliar Rp)	Total Daerah Belanja (Miliar Rp)	RKBO (%)	Kriteria
2018	1.235,47	1.500,87	82,32	Baik
2019	1.277,60	1.590,58	80,32	Baik
2020	1.312,11	1.501,98	87,36	Baik
2021	1.343,71	1.543,69	87,05	Baik
2022	1.465,79	1.646,06	89,05	Baik
2023	1.051,51	1.188,95	88,44	Baik
Rata-rata			85,76	Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 6 belanja operasi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dapat dikategorikan baik. Dimulai pada tahun 2018 yaitu sebesar 82,32% berada pada kategori baik, karena berada di antara interval 50%-100%. Pada tahun 2019 angka yang diperoleh sebesar 80,32% mengalami sedikit penurunan tetapi masih dalam kriteria baik karena masih

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

berada di antara nilai interval 50%-100% dalam kriteria baik. Di tahun 2020 perolehan persentase sebesar 87,36%, pada tahun 2021 sebesar 87,05%, tahun 2022 yaitu 89,05%, dan pada tahun 2023 perolehan rasio belanja operasi sebesar 88,44% yang masih dalam kriteria baik, karena di antara nilai interval 50%-100%.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal)

Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Miliar Rp)	Total Belanja Daerah (Miliar Rp)	RKBM (%)	Kriteria
2018	265,40	1.500,87	17,68	Tidak Baik
2019	312,98	1.590,58	19,68	Tidak Baik
2020	189,87	1.501,98	12,65	Tidak Baik
2021	199,97	1.543,69	12,95	Tidak Baik
2022	180,18	1.646,06	10,95	Tidak Baik
2023	279,81	1.188,95	23,53	Tidak Baik
Rata-rata			16,24	Tidak Baik

Hasil perhitungan tabel 7 RKBM, daerah Kabupaten Sanggau dari tahun 2018-2023 dikategorikan tidak baik. Diawali periode 2018 nilai persentase sebesar 17,68%, kemudian pada tahun 2019 dengan angka yang diperoleh sebesar 19,68%, diikuti pada tahun 2020 yaitu 12,65%. Pada tahun 2021 angka persentase yang diperoleh sebesar 12,95%, selanjutnya pada tahun 2022 sebesar 10,95%, dan pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan nilai persentase sebesar 23,53%, tetapi semuanya masih dalam kriteria tidak baik karena masih berada di nilai interval 0%-50% yang merupakan kriteria tidak baik. Rata-rata nilai persentase rasio yang diperoleh sebesar 16,24%% yang masih tergolong tidak baik, karena masih di interval 0%-50%.

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 8 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan Transfer (Miliar Rupiah)	Total Pendapatan (Miliar Rupiah)	RK (%)	Kemampuan Keuangan
2018	1.173,27	1.570,85	74,69	Sedang
2019	1.393,87	1.652,66	84,34	Tinggi
2020	1.187,28	1.521,39	78,04	Tinggi
2021	1.359,79	1.660,75	81,88	Tinggi
2022	1.332,48	1.594,43	83,57	Tinggi
2023	1.431,04	1.643,70	87,06	Tinggi
Rata-rata			81,69	Tinggi

Dari tabel 8 perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sanggau rata-rata

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

masih tinggi. Dapat dilihat pada tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 74,69% dalam interval 50%-75% yang merupakan kategori sedang. Pada tahun 2019 dengan angka 84,34% masuk kategori tinggi, karena berada di interval 75%-100%, pada tahun 2020 menurun menjadi 78,04%, tetapi masih tergolong dalam kriteria tinggi, karena masih berada di antara interval 75%-100%. Pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan sebesar 81,88%, dilanjutkan pada tahun 2022 dengan angka persentase sebesar 83,57% dan pada tahun 2023 sebesar 87,06% yang berada di interval 75%-100% dalam kriteria tinggi.

Dilihat dari hasil kriteria Derajat Desentralisasi yang sangat rendah, menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau harus terus memperbaiki diri, belum mampu mengelola kewenangan serta tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menggali PAD secara optimal. Rendahnya penerimaan PAD disebabkan oleh kurang mampunya pemerintah dalam pengelolaan sumber kekayaan daerah, retribusi daerah, pajak daerah, dan PAD lainnya.

Dari hasil tabel efektivitas PAD keseluruhan dapat diartikan bahwa pemerintah daerah sudah mampu dalam merealisasikan rencana penerimaan daerah yang telah dianggarkan dilihat dari hasil rata-rata rasio yang mencapai 111,29%, diatas 100% batas nilai interval yang dinyatakan sangat efektif.

Rasio efisiensi belanja dapat diartikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sanggau selama periode 2018-2023 dalam penggunaan biaya untuk memperoleh pendapatan yang terealisasi masih kurang efisien, dimana rasio rata-rata efisiensinya masih menunjukkan nilai sebesar 93,04% yang masuk kedalam kategori kurang efisien.

Dilihat dari hasil rasio pertumbuhan yang diperoleh selama periode tahun 2018-2023 dengan rata-rata -2% yang artinya pertumbuhan tidak terjadi sama sekali, karena batas bawah minimal nilai interval 0% dalam kriteria sangat rendah. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Sanggau masih belum mampu meningkatkan dan mempertahankan penerimaan PAD-nya, jika dinilai dari perolehan rasionya selama enam tahun terakhir kebanyakan malah PAD-nya minus.

Dari persentase RKKD menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih mendominasi, dimana rata-rata kedaulatan keuangannya masih tergolong pada hubungan instruktif atau tingkat kemandiriannya masih sangat rendah yaitu 9,63% masih dalam interval 0%-25%. Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara maksimal, seperti halnya dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat, pembangunan fasilitas publik, dan aktivitas operasi pemerintahan itu sendiri.

Dari hasil tabel 6 dan 7 menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau lebih mengutamakan belanja operasi dibandingkan belanja modal, dapat dilihat dari hasil rata-rata rasio belanja operasi yang lebih tinggi yaitu sebesar 85,76% yang di interval 50%-100% tergolong baik, sedangkan rata-rata belanja modal hanya sebesar 16,24% yang tergolong dalam kriteria tidak baik, karena berada di nilai interval antara 0%-50% dalam golongan tidak baik. Penyebab tingginya belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja jasa dan belanja lainnya yang tak terduga, sedangkan untuk belanja modal untuk pembangunan modal daerah tidak terlalu diutamakan. Hal ini seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dapat

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

menetapkan atau mengalokasikan mematok dana yang lebih besar untuk belanja modal seperti untuk belanja pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah wisata, serta untuk pembangunan yang produktif, untuk menambah pendapatan daerah.

Ketergantungan keuangan daerah, dilihat dari persentase yang diperoleh selama periode tahun 2018-2023 pemerintah daerah Kabupaten Sanggau ketergantungan keuangan masih tinggi terhadap pendapatan transfer pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat. Kebergantungan yang masih tinggi terhadap pendapatan transfer mengartikan pemerintah daerah belum mampu melaksanakan tugasnya secara maksimum dalam menggali sumber pendapatan asli daerahnya (PAD).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio-rasio diatas maka dapat dibuatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sanggau dilihat dari rasio derajat desentralisasi dengan rata-rata rasio, memperoleh angka sebesar 7,88% masih dibawah batas 10% dalam kriteria sangat rendah. Maka dapat disimpulkan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau masih belum mampu dalam mengelola dan menggali penerimaan PAD-nya, serta kewenangan dan tanggungjawab yang dipercayakan oleh pemerintah pusat belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. (2) Dari rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sanggau dari tahun 2018-2023 dapat dilihat perolehan rasio rata-ratanya sebesar 111,29% yang artinya sangat efektif, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam merealisasikan PAD-nya sangat baik. (3) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sanggau menunjukkan rata-rata rasio sebesar 93,04% yang artinya kurang efisien. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sanggau masih belum efisien dalam penggunaan biaya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan yang terealisasi. (4) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sanggau selama periode 2018-2023 dilihat dari rasio pertumbuhan belanja dengan rata-rata perolehan rasio sebesar -2,78% yang artinya sangat buruk karena batas bawah rasio yaitu 0%. Maka dapat disimpulkan pemerintah belum mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan PAD. (5) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sanggau dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah memiliki rata-rata rasio sebesar 9,63% masuk dalam kriteria instruktif yang berada pada nilai interval 0%-25%, yang artinya sangat rendah. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sanggau selama periode 2018-2023 masih belum mandiri dalam mengatur dan mengelola otonomi daerah, pendapatan masih didominasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (6) Kabupaten Sanggau dilihat dari rasio keserasian menunjukkan biaya untuk belanja operasi lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Belanja operasi memiliki rata-rata sebesar 85,76% yang dalam kriteria baik, sedangkan belanja modal hanya 16,24% yang termasuk dalam kategori tidak baik. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sanggau lebih memprioritaskan belanja operasi pemerintah daerah dibandingkan untuk belanja pembangunan aset-aset daerah seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik dan lainnya yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah. (7) Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sanggau dilihat dari rasio ketergantungan, rata-rata rasio yang diperoleh sebesar 81,69% yang tergolong kedalam kriteria tinggi. Dapat disimpulkan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam pembiayaan segala aktivitas pemerintahannya masih memiliki ketergantungan pihak lain

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Referensi

- Abdulaziz, N, S. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. *Jurnal ANALISIS KINERJA KEUANGAN*, 1.
- Ariadi, W., & Windi, J. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Di masa Pandemi Covid-19. *Jurnal EKONOMI & BISNIS*, 12.
- Chasanah, S, N., & Jihad, L. M. (2020). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5.
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17.
- Fathah, R, N. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8.
- Jansen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*, 3, 305-360.
- Kondo, F, S, B. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2018-2022).
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. *Andi*.
- Mardiasmo. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Daerah. *Andi*.
- Mataris, H., & Kumba, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7.
- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Purwanti, E., & Elien, N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 14.
- Putri, R, S, E., & Agus, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*, 1.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal DISTRIBUSI*, 7.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)